



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

Nomor SOP	: B.275/BPBL-L/HM.410/I/2024
Tanggal Pembuatan	: 26 Januari 2024
Tanggal Efektif	: 26 Januari 2024
Tanggal Pengesahan	: 26 Januari 2024
Disahkan Oleh	: Kepala BPBL Lombok  Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi
Nama SOP	: Uji Konsekuensi

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai *communication skill*
4. Kemampuan Pendokumentasian Informasi

**Keterkaitan**

1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
2. SOP Permohonan Informasi
3. SOP Permohonan Keberatan Atas Informasi

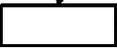
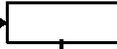
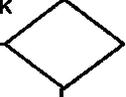
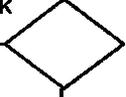
**Peralatan/Perlengkapan**

1. Komputer, Laptop, ATK
2. Jaringan Internet

**Peringatan**

**Pencatatan dan Pendataan**

1. Buku Tamu
2. Daftar Pemohon

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian/ PPID Unit Kerja Eselon I	Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	Atasan PPID Kementerian/ PPID Unit Kerja Eselon I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas Informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi KKP				dokumen Informasi publik, peraturan perUUan	3 hari	konsep kajian	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan Informasi publik selain Informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				konsep kajian	1 hari	rekomendasi	
3	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka Informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka Informasi publik akan ditutup				dokumen Informasi publik, peraturan perUUan	1 hari	surat penolakan	
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan Informasi yang dikecualkan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID				Konsep SK	14 hari	Konsep Keputusan Atasan PPID/PPID	Dapat berupa Keputusan PPID
4	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan Informasi yang dikecualkan				Konsep SK	1 hari	Keputusan Atasan PPID	